



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HaCipta milik UIN Suska Ria



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

## **SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD KHAIRUL ASRI**  
**NIM: 11724101212**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



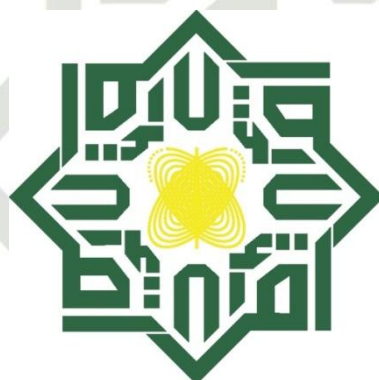
UIN SUSKA RIAU

- HasCipta Dilindungi Undang-Undang
- ©HasCipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7 TAHUN  
2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN  
KOTO KAMPAR HULU DALAM PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD KHAIRUL ASRI**

**NIM: 11724101212**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1442 H/2021 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)"*, yang ditulis oleh :

NAMA : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI

NIM : 11724101212

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2021

Pembimbing Skripsi,

AFRIZAL AHMAD, M. Sy



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqh Siyasah"*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Khairul Asri  
NIM : 11724101212  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2021 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Rozi Andrini, ME.Sy

Penguji I  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II  
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 196803 1 005

## ABSTRAK

**MUHAMMAD KHAIRUL ASRI (2021) : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu, penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif telah diatur di dalam undang-undang dan Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018, penyalahgunaan narkoba selalu terjadi setiap tahunnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu padahal larangan Tentang Penyalahgunaan Narkoba telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Bagaimana Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Koto Kampar Hulu. pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Pemerintah Kecamatan yaitu Camat Beserta Jajaran, Kepolisian Sektor Maupun Bhabinkamtibmas dan Organisasi yang terkait Seperti Granat. Data sekunder data yang didapat dari buku- buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh hasil penelitian bahwasannya terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Koto Kampar Hulu belum efektif dilakukan, terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya dibuktikan dengan data yang diperoleh dari pihak kepolisian bahwa dari tahun 2019-2021 telah terjadi 7 kasus penyalahgunaan narkoba, pemerintah Koto Kampar Hulu tidak rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi merupakan salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan permasalahan dana yang tidak cukup serta lambat turun dari pihak Kabupaten, tidak hanya itu saja, terkait dengan belum adanya Sektor Kepolisian di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu membuat penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sering terjadi dikarenakan luasnya wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu dan XII Koto Kampar. Dengan demikian hasil dari pencegahan dan penanggualangan penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masyarakat dan menciptakan kawasan yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

1. Hak Cipta dan Undang-undang tentang Keadilan dan Hak Cipta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliauulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “ **Implementasi Perda No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqh Siyasah** ”. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Syafril Imam, Ibunda HJ. Mardiana S.Pdi, Kakak Apt. Huda dan Safarina S.Farm dan Adik Nafisah Safarina yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituail kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag, selaku (Plt) Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor 1 Bapak Dr. H. Suryan A.Jamrah, M.A, Wakil iii Rektor II,

Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi. Ph.D.

dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan

I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin,

M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA. 4. Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan

petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan

motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibuk Dr. Jumny

Nelly M.Ag.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh

dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya,

yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama

menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

7. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS

angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan

kita tetap bersatu selamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Untuk Sahabat dan Teman-Teman. TUMID, The M.G,S, HTN A Squad, HMJ Hukum Tata Negara, HIMAPELBAPI, SOPAN SQUAD. Beserta seluruh Sahabat dan Teman Penulis lainnya.

Untuk semua keluarga, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama- namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

Pekanbaru, 22 Desember 2020  
Penulis

**Muhammad Khairul Asri**  
**NIM. 11724101212**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN KECAMTAN KOTO KAMPAR HULU</b> .....	18
A. Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	18
B. Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	19
C. Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	20
D. Bagan Organisasi Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	21
E. Demografis Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	22
1. Klasifikasi Penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	22
2. Pendidikan Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	22
3. Ekonomi Masyarakat Koto Kampar Hulu.....	23
4. Agama di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	24
5. Adat Istiadat di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS NARKOBA</b> .....	27
A. Narkoba .....	27
1. Definisi Narkoba .....	27
2. Jenis-Jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.....	28
3. Penyalahgunaan Narkoba.....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahaya Narkoba .....	36
5. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.....	37
Undang-Undang Tentang Narkoba dan Pengertian Perda .....	38
1. Undang-Undang Tentang Narkoba .....	38
2. Pengertian Perda.....	46
Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Pandangan Islam terhadap Narkoba .....	50
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	50
2. Pandangan Islam terhadap Narkoba.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Implementasi Perda No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	62
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

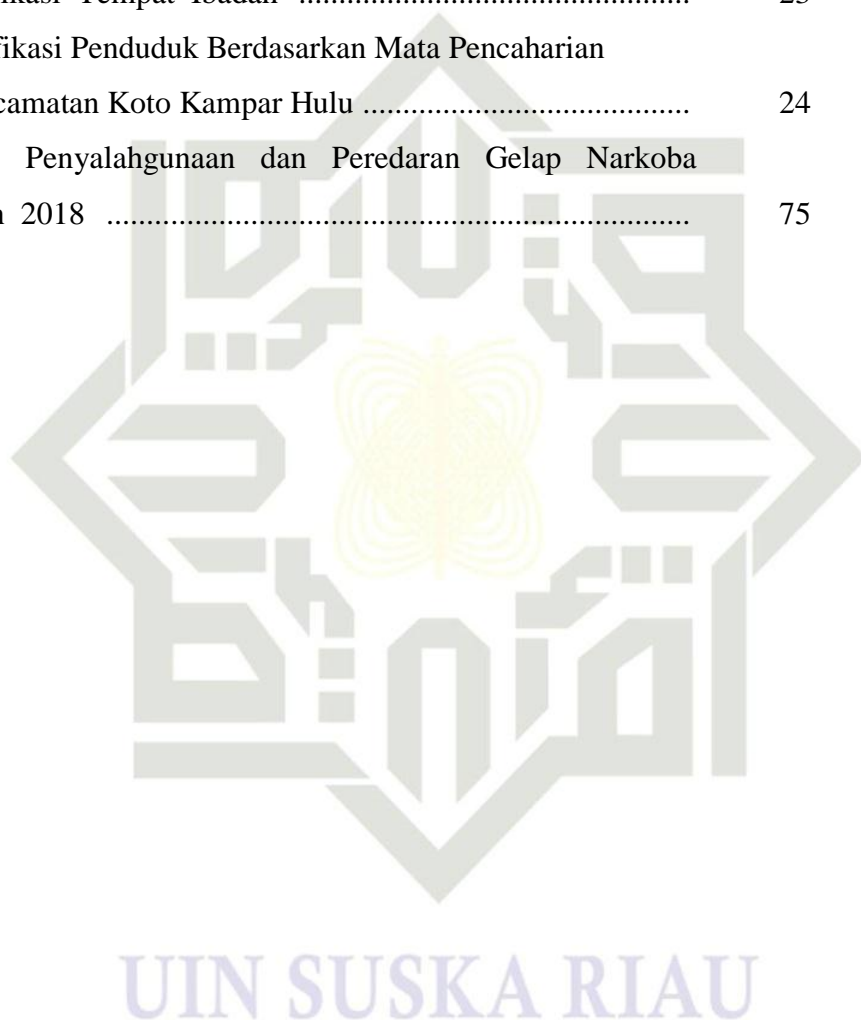
## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Iklm .....	19
Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin .....	22
Klasifikasi Sarana Pendidikan .....	22
Klasifikasi Tempat Ibadah .....	23
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	24
Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 .....	75





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini, antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak bisa dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organanization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman moderen narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.

Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang



merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>1</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang Nomor Tahun 1976 menandakan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi bahayanya penyalahgunaan narkotika. Begitu juga di setiap Provinsi dan Kabupaten di Indonesia telah menetapkan peraturan tentang penyalahgunaan narkoba ke dalam peraturan daerah, Provinsi Riau salah satunya perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, dan khususnya Kabupaten Kampar penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Untuk lebih efektif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), didasarkan pada peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

<sup>1</sup> Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009*, (Jakarta : PT Rineka Cipta 2009), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang- Undang tentang penyalahgunaan Narkotika diatur dan dijadikan hukum positif, tinggal bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah sahkan.

Penyalahgunaan narkotika dilakukan seseorang yang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, dalam agama Islam melarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa ke dalam tubuh. Terlebih, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan kematian dan juga menghilangkan akal, terutama di kalangan muda-mudi bahkan orang yang sudah berumur lanjut juga mengonsumsi barang haram ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>2</sup> Siswanto, *Politik Hukum . . .*, Ibid., h. 2

<sup>3</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakart: Raja Grafindo, 2007), h.102





Artinya: ‘‘Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan’’. (Q. S Al-Maidah [5] : 90)<sup>4</sup>

Pada zaman nabi, khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu arimah syurb al-khamr atau meminum khamar. Namun saat ini *al-khamar* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkoba.<sup>5</sup> Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, cair, makan atau minuman adalah termasuk khamar, dan telah diharamkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat,<sup>6</sup> dalam hal ini jelas terlihat bahwasanya narkoba adalah suatu zat yang bisa menghilangkan akal tentu ketika seseorang yang kehilangan akal akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru, karena ia tidak berada dalam alam sadarnya sehingga memunculkan suatu tindakan yang merugikan baik itu untuk dirinya maupun orang lain.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasarnya

Kementrian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan : Juz 1-Juz 30*, (Bandung : Mikraj Khazanah), h. 123

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH 2016), Cet 1, h.59

Liki faizal, 2015, Penyalahgunaan Narkoba dalam pandangan islam, Jurnal upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba, ASAS, Vol, 7 h.1



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Upaya pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan ini kurang efektif walaupun undang-undang tentang narkoba sudah dikeluarkan. Pemerintah beserta kepolisian telah menempuh berbagai cara untuk menanggulangi tindak pidana narkoba salah satunya dengan upaya penanggulangan yang dilakukannya itu baik secara pre-emitif artinya melalui berbagai kegiatan sosialisasi anti narkoba, secara preventif yaitu patroli di kecamatan Koto Kampar Hulu dan represif melalui kebijakan penal.

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan ini pada praktiknya tidak berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai faktor, keberadaan penyalahgunaan narkoba di wilayah ini membuat keresahan dan kekhawatiran di masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merajalela di semua kalangan, modus awal dari penyalahgunaan narkoba hanyalah pemberian percuma kepada target, namun setelah target mengkonsumsi barang ilegal ini menimbulkan ketagihan sehingga korban dari penyalahgunaan narkoba ini menjadi ketergantungan, selanjutnya, karena sudah ketergantungan untuk mendapatkan akhirnya dibeli kepada pengedar narkoba. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi modus ini sudah merambah kepada anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

---

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015), Cet.2 h.39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbukti dengan terjadinya peredaran gelap narkoba di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu tepatnya di Desa Tanjung dan Gunung Malelo pada Selasa tanggal 27 bulan 8 Tahun 2019 tersangka DD alias NM di Dusun I Desa Tanjung, dari penangkapan ini didapati barang bukti 10 paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 8,89 gram, dan pada hari yang bersamaan petugas kepolisian juga mengamankan tersangka ZL alias FK, saat berada di Dusun III Gunung Malelo setelah melakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti 2 paket narkotika jenis Shabu seberat 5,61 gram.<sup>8</sup>

Hasil wawancara penulis dengan salah satu kepolisian yaitu Bhabinkaptibmas yang bertugas di wilayah Koto Kampar Hulu yang mana mengatakan "Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar, secara geografis kecamatan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, peredaran Narkoba masih merajalela kesemua kalangan baik itu remaja, pemuda, bahkan orang yang sudah berumur lanjut, pemutusan tali rantai dari penyalahgunaan narkoba di kecamatan ini masih belum bisa terlaksana, dikarenakan arus teknologi yang begitu canggih sehingga mata rantai dari narkoba masih merajalela di kalangan masyarakat, hal ini sangat memprihatinkan untuk generasi berikutnya. Selama ini pihak kepolisian sudah berusaha dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, tindak pidana ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan secara





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terorganisas dan juga tidak sembarangan dalam meringkus pelaku, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kepolisian dan lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penulis tertarik memilih untuk meneliti permasalahan melalui karya ilmiah yang berjudul **"Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah "**.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah implementasi peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif dalam perspektif fiqh siyasah di Kecamatan Koto Kampar Hulu, penelitian ini berfokus pada pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu?

---

<sup>9</sup>Onrianto, (Bhabinkamtibmas), Wawancara 13 Agustus 2020, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu?

## 9. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian dari permasalahan yang akan dikaji, di antaranya :

- a. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan fiqh Siyasah Terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kegunaan Penelitian.

2. Kegunaan Penelitian

Dari aspek teoritis

1. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif di masyarakat dan studi ilmu politik khususnya *fiqh siyasah*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan sumbangan pemikiran pembaharuan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang ada di Indonesia khususnya dibidang penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

Dari aspek praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan Kabupaten Kampar dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat luas.
2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif bagi keselamatan bangsa.
3. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bahayanya narkoba, psikotropika dan zat adiktif terhadap generasi penerus bangsa.

## B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu :

Suatu Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di yang ada lapangan<sup>10</sup>. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

---

<sup>10</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995 ), h. 58





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>11</sup>

#### Lokasi penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat adanya permasalahan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih adanya penggunaan narkoba secara ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab di beberapa desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam Skripsi ini, adalah pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Camat, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kepala Desa, Kepolisian dan Granat.

##### Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan dari peraturan daerah No 7 di Kecamatan Koto Kampar Hulu.. Adapun Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pemerintah (2) Koordinasi antara lembaga dalam

---

<sup>11</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba (3) Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang berupa fakta yang diperoleh dari lapangan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.<sup>12</sup> Data ini umumnya diperoleh dari hasil observasi penulis tentang bagaimana Kejadian yang terjadi di Kecamatan Koto Kampar Hulu yakni Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba, dan diperoleh dari wawancara dengan yang melaksanakan Perda ini yaitu Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Hal ini Camat, Kasi Kesejahteraan Sosial beserta Jajaran, Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta jajaran), Kapolisian setempat (Kepala Bagian Reskrim, Bhabinkabtibmas yang bertugas di desa Tanjung, Gunung Malelo, Sibiruang dan Bandur Picak) dan organisasi

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta. 2017), h. 99



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu Granat.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian serta data yang ada pada pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu seperti data klasifikasi penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu dan data yang berhubungan dengan Penelitian ini, data dari Kepolisian setempat tentang data yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan/implementasai Perda Nomor 7 tahun 2018 pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Populasinya adalah pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Camat 1 orang, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 1

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT Rajawali Persada 2003) h.133

Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 147





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, Kepolisian yaitu Kepala Bagian Reskrim 1 orang, Bhabinkabtimas berjumlah 2 orang, Kepala Desa berjumlah 3 orang yaitu kepala desa Sibiruang, Tabing dan Gunung Malelo, Ketua Umum Granat (Gerakan Anti Narkotika) .

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>15</sup> Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah total sampling. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi,<sup>16</sup> alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sample penelitian semuanya.<sup>17</sup> sehingga ada sebanyak 8 orang yaitu, Camat (1 orang), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (1 orang), Kapolisian (3 orang) , Kepala Desa (3 orang) dan Ketua Granat (1 orang).

## 6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakan penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan mendatangi desa-desa yang menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan memperoleh informasi dari Bhabinkamtibmas setempat, serta melakukan pengamatan terhadap

h. 104 Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara) h. 102  
 Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2009)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito 1985) h. 105



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa sosialisasi kepada masyarakat dan himbauan dengan menempelkan baliho atau sejenisnya disekitar desa terhadap bahayanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Wawancara, yang di terapkan dalam proses wawancara penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang di teliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini melibatkan beberapa narasumber yaitu orang yang melaksanakan dari peraturan ini diantaranya adalah Camat, Kepolisian Sektor, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dan lembaga lainnya.

- c. Dokumentasi, adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti , catatan serta buku-buku yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah berupa informasi yang didapat dari yang melaksanakan Perda ini, Berupa dokumen dari Kepolisian Sektor tentang penyalahgunaan narkoba, data peredaran narkoba, serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

#### 7. Analisis Data

Analisa data menurut Sugiyono adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan berhubungan, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, yaitu "Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah".

Dalam penelitian Perda ini digunakan metode Analisa kualitatif yaitu suatu data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

## 2. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

Ishaq. *Op-Cit*, h.126





## **BAB II : GAMBARAN KECAMTAN KOTO KAMPAR HULU**

Pada bab ini merupakan gambaran Kecamatan Koto Kampar Hulu, menjelaskan sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu, Visi Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu, Geografis dan Demografis Kecamatan Koto Kampar Hulu serta dengan data pendukung lain seperti ekonomi masyarakat dan klasifikasi tingkat pendidikan di Kecamatan Koto Kampar Hulu. .

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS NARKOBA**

Tinjauan tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang memaparkan tentang pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta dampak dari Penyalahgunaan narkotikas dan bagaimana upaya kebijakan dari pemerintah dalam pencegahan Narkotika, membahas Undang-Undang yang berkaitan dengan Narkotika, Seperti UU NO 35 Tahun 2009 yang menjadi rujukan Undang-Undang tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif bagi peraturan peraturam daerah yang ada di Indonesia, Serta pandangan Islam terhadap Narkotika Khususnya di bidang fiqih Siyasah serta dasar hukumnya.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan, selanjutnya diikuti daftar kepustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### GAMBARAN KECAMATAN KOTO KAMAPAR HULU

#### A. Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kecamatan baru hasil dari pemekaran di Kabupaten Kampar. Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 2 tahun 2010. Kecamatan Koto Kampar Hulu diresmikan oleh Bupati Kampar pada tanggal 11 Juni tahun 2010 yang ibu Kecamatannya Desa Tanjung dengan Camat pertama bernama Mahrusi, SST.

Sebagai Kecamatan yang baru dibentuk, kondisi yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu serba terbatas, untuk itu aparatur pemerintahan Kecamatan koto kampar Hulu berupaya melakukan pengembangan dari sektor sarana dan prasaran di Kecamatan, kemudian Kecamatan Koto Kampar Hulu juga bertekad agar Visi Bapak Bupati Kampar yaitu mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis pada tahun 2011 dapat tercapai dan terwujud, terutama di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 6 desa yang terdiri dari 5 desa tempatan dan 1 desa exs-Trasmigrasi (pindahan dari XII Koto Kampar) dengan nama-nama desa yaitu sebagai berikut:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Desa Tanjung.
- 2) Desa Tabing.
- 3) Desa Pongkai.
- 4) Desa Gunung Malelo.
- 5) Desa Sibiruang.
- 6) Desa Bandur Picak.<sup>19</sup>

### 3. Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu

Adapun letak geografi ataupun batas wilayah dari Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandalian (Kabupaten Rokan Hulu)
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapur Sembilan (Kecamatan Lima Puluh Kota)
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar
- 4) Sebelah Barat Kecamatan Lima Puluh Kota

Kecamatan Koto Kampar hulu memiliki luas wilayah  $\pm 856,07$  KM2 yang terdiri dari 6 desa dan 1 dan satu desa eks-trasmigrasi. Iklim yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai mana Iklim di Indonesia yaitu kemarau dan hujan.<sup>20</sup>

**Tabel I.1**  
**Iklim**

Curah hujan	3.333	Minggu
Jumlah bulan hujan	9	Bulan
Ketembapan	-	Ha/m2
Suhu rata-rata harian	31.32	Ha/m2
Tinggi tempat dari permukaan laut	87	Ha/m2

**Sumber :** Dokumen Kantor Camat Koto Kampar Hulu Tahun 2018



### C. Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu

Visi Kecamatan Koto Kampar Hulu

” Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat. Dan Transparan di Kecamatan Koto Kampar Hulu ”

Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu

Adapun Misi dari Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- 2) Menciptakan pelayanan yang nyaman, efektif, efisien dan berkualitas.
- 3) Meningkatkan Kualitas Aparatur Kecamatan dalam menggunakan fasilitas kerja sehingga terwujud pelayanan yang optimal.
- 4) Mewujudkan kerja yang harmonis antar aparatur pemerintah, instansi lainnya dan masyarakat dalam segala sektir.
- 5) Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kecamatan Koto Kampar Hulu sehingga pelayanan tepat waktu. Membudayakan lingkungan kerja yang bersih, rapid dan sehat.<sup>21</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



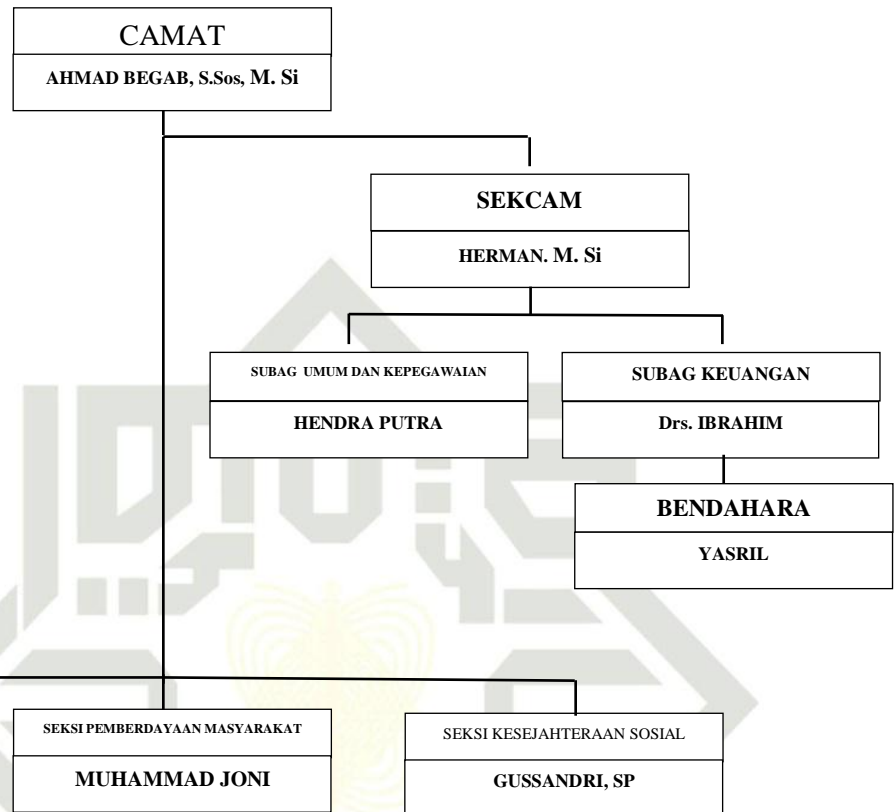
#### D. Bagan Organisasi Kecamatan Koto Kampar Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU





## E. Demografis Kecamatan Koto Kampar Hulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 Kecamatan Koto Kampar Hulu mempunyai penduduk 23,359 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 12,056 jiwa perempuan 11,303 jiwa dan 6.670 KK, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel I.2**  
**Klasifikasi Jumlah Penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	12,056	50,00 %
2.	Perempuan	11,303	49,99 %
	Jumlah	23,359	100 %

**Sumber :** Dokumen Kantor Camat Koto Kampar Hulu Tahun 2020

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pada perempuan yaitu laki-laki 12,056 jiwa 50,00% sedangkan perempuan 11,303 jiwa 49,99%.

### 2. Pendidikan Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki sarana pendidikan guna menecerdaskan generasi berikutnya untuk memajukan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Adapun sarana pendidikan tersebut seperti pada tabel berikut :

**Tabel I.3**  
**Klasifikasi Sarana Pendidikan Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Taman Kanak – Kanak dan Paud	16	Swasta dan Negeri
2.	MDA	13	Swasta
3.	Sekolah Negeri (SD)	13	Negeri
4.	SMP, MTS dan Pondok	10	Swasta dan Negeri
5.	SMA dan Ma	4	Negeri
	Jumlah	43	

**Sumber :** Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, dapat lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu telah memadai untuk menunjang pendidikan masyarakat baik di luar ataupun yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

### 3. Ekonomi Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu lebih dominan dengan petani, hal ini ditandai dengan penggunaan tanah di Kecamatan Koto Kampar Hulu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian/perkebunan baik itu sawit, karet dan gambir. Disamping itu, masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu juga ada yang berprofesi sebagai buruh, PNS, pedagang, peternak, nelayan, montir, perawat, TNI, POLRI, pengusaha, dan karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya, bias dilihat pada table berikut ini :

**Tabel I.4**  
**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**  
**di Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Mata Pencaharian	Juamlah	Persentase
1.	Petani	5.830 orang	76,79 %
2.	Buruh	190 orang	2,50 %
3.	PNS	744 orang	9,79 %
4.	Pedagang	13 orang	0,17 %
5.	Peternak	583 orang	7,67 %
6.	Nelayan	167 orang	2,19 %
7.	Montir	18 orang	0,23 %
8.	Perawat/Dokter/Bidan	4 orang	0,05 %
9.	TNI	3 orang	0,03 %
10.	POLRI	15 orang	0,19 %
11.	Pengusaha	6 orang	0,07 %
12.	Karyawan Swasta	19 orang	0,25 %
	Jumlah	7.592 orang	100 %

**Sumber :** Dokumentasi Kantor kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu berpenghasilan sebagai petani dengan persentase mencapai 76,79 %.

#### 4. Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

Agama merupakan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya, dengan adanya agama hidup akan lebih teratur dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu mayoritas beragama Islam dengan persentase 99 % dan 1 % beragama lain seperti Kristen, Budha dan Hindu. Adapun sarana atau tempat ibadah yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Klasifikasi Tempat Ibadah Kecamatan Koto Kampar Hulu**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	18
2.	Musollah	43
	Jumlah	60

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2018

#### 5. Sosial Budaya dan Adat Istiadat Kecamatan Koto Kampar Hulu

Di lihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *matrilineal* yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Adat istiadat merupakan salah satu ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta. Lingkungan tempat tinggal dan cara bergaul.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Koto Kampar Hulu, karena adat adalah proses yang alami terjadi tidak ada secara tertulis namun bisa di baca, dirasakan dan dipraktekan, kemudian diwarisi secara turun temurun. Hukum Adat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar termasuk juga kedalam Hukum adat yang menganut prinsip “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*” (*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*). Dari segi prinsip material peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi- sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keIslaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Dari segi adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu dipengaruhi oleh agama Islam. Karena dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak ditemukan agama lain selain agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran , menikah, dan ketika ada diantara warga yang maninggal dunia. Dan ketiga bentuk agenda tersebut dipengaruhi oleh budaya/tradisi adat dan juga hukum Islam.

Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari beberapa suku, diantaranya:

- a. Suku Domo
- b. Suku Pitopang
- c. Suku Piliang
- d. Suku Melayu



e. Suku Chaniago

f. Suku Niliong<sup>22</sup>

Dalam setiap suku memiliki beberapa orang ninik mamak yang masing-masing memiliki gelar Datuk/ Mamak. Ada 2 fungsi yaitu :

- 1) Fungsi Keluar, yaitu bertindak sebagai wakil masyarakat dengan salah satu tugasnya menghadiri undangan atau mewakili masyarakat yang bersuku tertentu apabila ada acara adat di luar daerah.
- 2) Fungsi dalam, yaitu mengawasi dan mengatur masyarakat setempat tentang adat istiadat sesuai dengan suku mereka masing-masing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS NARKOBA

#### A. Narkoba

##### 1. Definisi Narkoba

Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA ( Narkotika, alkohol, dan Zat Adiktif lainnya ) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering kali menyebabkan ketergantungan.<sup>23</sup>

Akibatnya kerja otak berubah meningkat atau menurun demikian pula fungsi organ tubuh lain. Pendapat ini sejalan dengan yang ada dalam UU RI No 17 tahun 1997 tentang narkotika, pada pasal satu mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis (buatan) maupun semi sintetis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 153.

<sup>24</sup> Undang-undang Bidang Hukum, *Kesehatan, Psikotropika, dan Narkotika* (Jakarta : Eka Jaya, 2003), 145.





## 2. Jenis-jenis NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif)

BNN atau (Badan Narkotika Nasional) membagi NAPZA menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, setiap jenis dibagi ke dalam beberapa kelompok.

### a. Narkotika

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, Narkotika adalah zat atau obat bahan pemula atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Undang – Undang ini.<sup>25</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan pasal 6 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan mengenai maksud dari golongan-golongan narkotika, yaitu:

<sup>25</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Narkotika golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: heroin, ganja, opium, sabu sabu, extacy, dan kokain.
- 2) Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: morfin, fentamil, alfametadol, dan bezetidin.
- 3) Narkotika golongan III: narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembanagan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contohnya yaitu: kodein, propiram, norkedenia, dan etilmorfina.<sup>26</sup>

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat. Baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>27</sup> Menurut potensi menyebabkan ketergantungannya, psikotropika dikelompokkan menjadi:

<sup>26</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 83

<sup>27</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, pasal 1 angka 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Psikotropika golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.
- 2) Psikotropika golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi secara terbatas. Contoh: *amfetamin*, *Metamfetamin (sabu)*, *fenisiklidin (PCP)*, dan *ritalin*.
- 3) Psikotropika golongan III: potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: *pentobarbital*, *flunitrazepam*.
- 4) Psikotropika golongan IV: potensi ringan menyebabkan ketergantungan, dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: *diazepam*, dan *nitrazepam*. (Nipam, pil BK, DUM, MG).

#### c. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaanya, memberi prioritas pada penguasaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.<sup>28</sup>

Yang sering disalahgunakan adalah:

- 1) *Alkohol*, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras
- 2) *Inhalansia/Solven*, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
- 3) *Kafein*, pada minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pasal 1 angka 1.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggolongan narkotika, *psikotropika*, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

- 1) *Opioida*: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunnnya kesadaran. Contoh: *opium, morfin, heroin, dan petidin*.
- 2) Ganja (*mariyuana, hasis*): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
- 3) *Kokain* dan *Daun Kokai*, tergolong stimulansia (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
- 4) Golongan *Anfetamin* (stimulansia): *Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin)*.
- 5) *Alkohol*, yang terdapat pada minuman keras.
- 6) *Halusinogen*, memberikan halusinasi (khayal). Contoh LSD.
- 7) *Sedative dan hipnotika* (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
- 8) *PCP (femsiklidin)*.
- 9) *Solven dan Inhalansi*: gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
- 10) *Nikotin*, terdapat pada tembakau (termasuk stimulansia).
- 11) *Kafein* (stimulansia), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.

### 3. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika, *psikotropika* dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau secara melawan hukum, dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.<sup>29</sup> Penyalahgunaan NAPZA merupakan penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya dapat menenangkan pemakai maka NAPZA kemudian di salah gunakan, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya. Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu ;

- a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Kampar Tentang Pencegahan dan Penganggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, pasal 1 angka 1.



#### 1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba.

#### 2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

#### 3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

#### 4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.<sup>30</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h. 53.





## b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

### 1) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan, kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang. Dikarenakan barang ilegal ini bukan suatu barang yang murah.

### 2) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.<sup>31</sup>

### 3) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.



#### 4) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Perintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

#### 5) Ketidak senangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

---

*Ibid.* h. 56



#### 4. Bahaya Narkoba

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan, mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Memang tidak bisa dikesampingkan bahwa zat-zat narkotika dan sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba menurut efeknya diantaranya adalah :

- 1) Halusinogen, efek dari narkoba ini mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain dan LSD.
- 2) Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja orga tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- 4) Adiktif, Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya ganja, heroin, putaw.
- 5) Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian.<sup>33</sup>

## 5. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan, menghindarkan dan/atau menghalangi masyarakat dari faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.<sup>34</sup> Di dalam Perda Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2018 tentang pencegahan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif di atur dalam pasal 6.

Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

<sup>33</sup> Warso Sasongko, *Narkoba*, (Yogyakarta, Relasi Inti Media, 2017), h.4-5

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Kampar Tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, pasal 1 angka 1.



di masyarakat melalui rehabilitas sosial serta pembinaan dan pengawasan.<sup>35</sup>

Di dalam perda Kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2018 tentang pencegahan narkotika di atur dalam pasal 23.

## **B. Undang-Undang Tentang Narkoba dan Pengertian Peraturan Daerah (Perda)**

### **1. Undang-Undang Tentang Narkoba**

#### **a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Politik hukum UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dengan pertimbangan :

1) Bahwa untuk mewujudkan, masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata materil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Kampar Tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, pasal 1 angka 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

4) Bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, narkoba, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindakan pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

5) Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi serta pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas dan tujuan pengaturan





narkotika yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.<sup>36</sup> Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini adalah :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.<sup>37</sup>

Ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, narkotika ini digolongkan kedalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 35 tahun 2009, meliputi beberapa kegiatan, yakni :

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Siswanto, *op.cit*, h.20

<sup>37</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2020), h.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa : Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu pengetahuan dan Teknologi, Penyimpanan dan Pelaporan.
- 2) Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan : Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Izin Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.
- 3) Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan : Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
- 4) Kebijakan tentang Label dan publikasi, di mana Industri Farmasi wajib mencantumkan Label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
- 5) Kebijakan tentang Ketentuan Prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor, narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, dan pengadaan.
- 6) Kebijakan tentang Pengobatan dan Rehabilitas, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 7) Kebijakan tentang Pencegahan /Pemberantasan Narkotika, meliputi: Kedudukan dan tempat Kedudukan , dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijaka Pemerintah lain bahwa Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang ini. Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentiannya Kepala BNN yang man dalam ketentuan undang-undang ini Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu malah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.





Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaliknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>39</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Memahami “Kebijakan : dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, disamping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.”<sup>40</sup>

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Pertimbangan UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:

- 1) bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat dan damai;

<sup>39</sup> Doni Albert Kela, Jurnal penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Vol, I, h.106.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 110



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika;

3) bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;

4) bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional;

5) bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional;

6) bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika

Dengan persetujuan DPR-RI maka Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Trffe in Narcotic Drugs and Psychotropic*, 1953 pad tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara R.I 1997 Nomor 17. Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 5 Tahun 1997 mengenai ketersediaan psikotropika untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka dipersyaratkan hanya untuk psikotropika golongan I dilegalkan, sedangkan pengguna selain kepentingan tersebut maka untuk psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang. Ketentuan tentang produksi, peredaran psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.<sup>41</sup>

Dalam rangka menaggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai konvensi, yaitu: a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substance 1971*) dan, b. Konvensi pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*). Dunia internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi di atas. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971*.<sup>42</sup>

Adapun tujuan pengaturan psikotropika terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu:

Siswanto, *op.cit*, h.38

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, ( Jakarta: Djmbatan, 2004). h. 16





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
- 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,
- 3) Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Dengan memperhatikan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

## 2. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten /



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota”. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>43</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.

---

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.<sup>44</sup>

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam

---

Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005), h. 131-132





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.<sup>45</sup>

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar maka pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif diatur di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 dengan harapan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak lagi terjadi di Kabupaten Kampar.

## C. Fiqh Siyasah Dusturyah dan Pandangan Islam Terhadap Narkoba

### 1. Pengertian Siyasah Dusturyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>46</sup>

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prameka Group 2014), h. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.<sup>47</sup>

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya "jalan yang lurus". Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh fuqaha sebagai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

#### a. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil

<sup>47</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>48</sup>

Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-

undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya

Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

#### b. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Berikut ini adalah dasar hukum siyasah dusturiyah :

Al-qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui

---

*Ibid*, h. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>49</sup> Adapun ayat Al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya''

#### 1) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>50</sup>

## 2) Ijma

Ijma Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.<sup>51</sup>

## 3) Qiyas

Qiyas berasal dari kata “*qasa, yaqisu, qaisan*” artinya mengukur dan ukuran.<sup>52</sup> Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h.53

<sup>51</sup> *Ibid.* h.54.

<sup>52</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul fiqh*, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2017) Cet.ke3, 172





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>53</sup>

#### Peraturan Daerah menurut Siyasah Dusturyah

Dalam ruang lingkup kajian siyasah dusturyah, tasyri'iyah atau *Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:<sup>54</sup>

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syarat Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka

<sup>53</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.55  
<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.162



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislative apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislative harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>55</sup>

## 2. Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam

Dasar Hukum Narkoba dalam Islam

Narkoba yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat al-Qur'an

---

*Ibid*, h.162



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamar* saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'. Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat*, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja.<sup>56</sup>

Secara semulajadi, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran. Oleh itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Begitupun apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya ('*illah*'). Karenanya, hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqh disebut sebagai *al-hurmah li ghairih*. Haramnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara tradisinya dikaitkan melalui qias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan '*illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Suwandi. ,Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam', *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005). h. 245

<sup>57</sup> Lateefah Kasamasu, 2017, Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer, Vol.18, No.1, 2017. h. 45





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika dalam Al Qur'an maupun Hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah Narkoba melainkan hanya istilah khamr. Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. (Q. S Al-Maidah [5] : 90)<sup>58</sup>

Ayat diatas menerangkan larangan tentang meminum khamar, sifat khamr itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka sama hukumannya dengan hukuman khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukan, termasuk dalam hal ini narkoba orang-orang yang memakainya termasuk orang yang di murkai Allah SWT, Rasul-nya dan kaum muslimin. Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.<sup>59</sup> Narkoba merupakan suatu jalan menuju kehancuran bagi kehidupan manusia, ketika sudah berada di dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba,

Kementrian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan : Juz 1-Juz 30*, (Bandung : Mikraj Khasanah), h. 123

Hamzah Hasan, 2012, *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol.1/ No.1. h. 153



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan sulit untuk keluar dikarenakan kecanduan yang di berikan sangat luar biasa sehingga menyebabkan keinginan untuk terus menggunakan Narkoba, namun efek dari itu semua adalah kehancuran bagi yang menyalahgunakan narkoba, sebagaimana firman Allah Swt :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Qs. Al-Baqarah [2]: 195)<sup>60</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa’ [4]: 29).<sup>61</sup>

Dari ayat diatas terlihat bahwasanya narkoba adalah jalan menuju kebinasaan dan bisa mengakibatkan kematian bagi penyalahguna narkoba. Narkoba dan rusaknya telah banyak dikupas oleh beberapa orang ulama’ seperti Dr.Yusof al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitar dalam kitabnya al-Jam’ liqawli al-ada’iyyah wa al-aghziyyah. Oleh karena tiadanya ayat Al-Quran atau Hadis Nabi s.a.w yang menyebut secara khusus perkataan Narkoba (*al-Makhaddirat*) bukan makna ia adalah halal.<sup>62</sup> Para ulama’ silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi Saw atau para Sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama’ silam adalah perkataan *al-afyun* (opium) dan *al-Hashish*. Mereka menggunakan dalil umumnya nash hadis Nabi Saw atau secara qias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai ‘illah (sebab) yang sama

<sup>60</sup> Kementrian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan* op. Cit. h.83

<sup>61</sup> Ibid., h. 83

<sup>62</sup> Lateefah Kasamasu, *op.cit.* h. 46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *al-iskar* (memabukkan).<sup>63</sup> Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Dikutip dari Jurnal Lateefah Kasamasu, Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

*“Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam al-Qur’an)*

Al-Zahabi (748H) berkata:

*“Narkoba yang berasal dari daun, hukumnya haram seperti arak. Yang mengambilnya dikenakan hukum hudud sebagaimana peminum arak”. (al- Zahabi, al-Kaba’ir)*

Imam al-Bahuti (1051H) menyatakan:

*Tidak dibolehkan mengambil Narkoba yang boleh memabukkan. (al-Bahuti, Kashaf al-Qina’ an Matni al-Iqna’)*

Manakala Ibn al-Qaiyim (751H) pula menegaskan bahwa:

*Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan sama ada cecair atau pepejal, perahan atau yang dimasak. Ia juga merangkumi buaian kefasikan dan maksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih. (Ibn al-Qaiyim, Zaad al-Ma’aad)<sup>64</sup>*

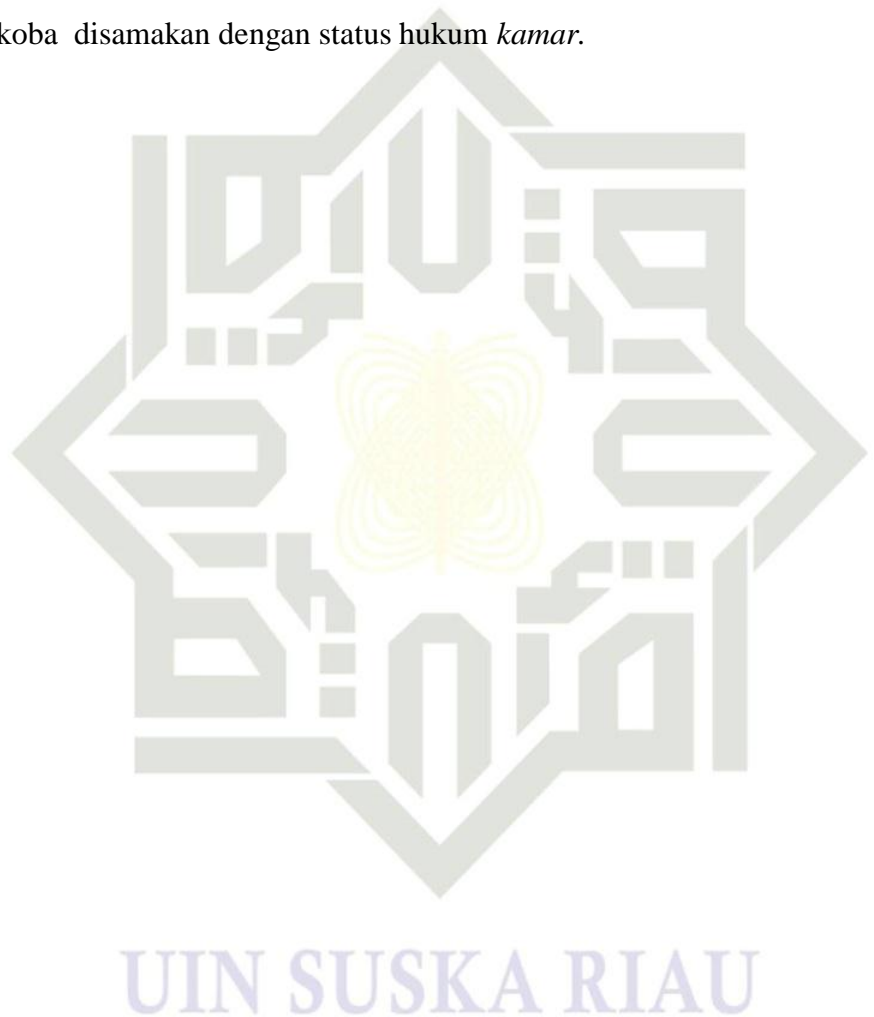
---

*Ibid*, h. 47

*Ibid*, h. 47



Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkoba belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal bagi orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkoba lebih berbahaya, sehingga status hukum narkoba disamakan dengan status hukum *kamar*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pencegahan dan Penanggualangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Kecamatan Koto Kampar Hulu belum efektif walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mengendalikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait, faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu masih saja terjadi setiap tahunnya.
2. Tinjauan Fiqh Siyash yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Siyash Dusturiyah, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi keamanan rakyatnya bisa dikatakan Maslahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah melakukan berbagai upaya yaitu dengan cara sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan kepolisian serta lembaga terkait dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggualangan penyalahgunaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika, psikotropika dan zat adiktif namun upaya yang dilakukan belum efektif dikarenakan adanya kendala yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak rutin, dana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terbatas, dan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan pihak BNK yang membutuhkan proses sehingga membutuhkan waktu yang lama dan juga belum adanya Sektor Kepolisian di Kecamatan Koto Kampar Hulu membaut lambanya terhadap pencegahan dan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba, karena Sektor Kepolisian masih bergabung dengan Kecamatan XII Koto Kampar. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas masyarakat yang di pimpinya, terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba, para ulama telah sepakat bahwa narkoba hukumnya haram jika disalahgunakan, sehingga peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan baik sangat dituntut, agar penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak terjadi, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu belum melaksanakan Perda No. 7 Tahun 2018 dengan efektif, sehingga pelaksanaan/Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak sesuai dengan ketentuan fiqh Siyasah.





## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan/implementasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu, untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Koto Kampar Hulu. Selain itu, diharapkan kepada kepolisian agar lebih sering melakukan patroli di wilayah Koto Kampar Hulu, dengan harapan permasalahan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba, psikotropika, dan zat adiktif teratasi dengan baik.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu untuk lebih peduli dan waspada terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat ada yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hal Cipta Dilindungi Undang-undang  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II  
Hukum Islam
1. Haruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada
2. Abdullah R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
3. Arunkunto; Suharismi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung
4. Arunkunto S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara 191
5. Kela A, D, *Jurnal penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Vol, I
6. Faizal I. 2015, *Penyalahgunaan Narkoba dalam pandangan Islam, Jurnal upaya pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba*, ASAS, Vol,7
7. Hasan H, 2012, *Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vo.1/ No.1
8. Iskandar A, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
9. Afan, N, M. 2006. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : AMZAH. Cet 1
10. Iqbal M, 2014, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group
11. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta. 2017
12. Imdan K, I, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1
13. Kasamasu L, 2017, *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18, No.1
14. Kementerian Agama. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan : Juz 1-Juz 30*. Bandung : Mikraj Khazanah
15. Suwanda, 2005 , *Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam'*, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 Maret
16. Juliansyah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana
17. Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakart: Raja Grafindo



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong, J, L. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Makarna M, T, 2003, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jalir, Moh. 2009. *Metode penelitian*. Bogor : Ghalla Indonesia
- Subungan S, 1993, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Febani, A, B. 2015. *Fiqh Siyasah* , Bandung: CV Pustaka Setia , Cet.2
- Febani, A, B. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Asongko H, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* Bandung: Mandar Maju
- Surakhmad W. 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito
- Asongko W, 2017, *Narkoba*, Yogyakarta, Relasi Inti Media
- Isiwanto. 2009. *Politik Hukum dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Supramono G, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djmbatan
- Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Qardhawi Y, 1408 H-1998 M, *Fatwa-Fatwa Kotempore*, Darul Ma’rifah, Beirut-Libanon Cet IV



## DOKUMENTASI

- Hak C  
© H
1. Diil:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Camat Koto Kampar Hulu



## Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial



## Wawancara dengan Kepala Desa Sibiruang



## Wawancara dengan Kepala Desa Tabing

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Wawancara dengan Kepala Desa Gunung Malelo**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Wawancara dengan Kasat Reskrim XIII Koto Kampar



## Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Tanjung dan Desa Tabing



## Wawancara dengan Bhabinkamtibmas Desa Sibiruang dan Desa Gunung Malelo

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqh Siyasah "*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Khairul Asri  
NIM : 11724101212  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Rozi Andriani, ME.Sy**

Penguji I  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Mengetahui  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI  
 NIM : 11724101212  
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
 Judul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7  
 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
 PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
 DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DALAM  
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6986/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI  
NIM : 11724101212  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kecamatan Koto Kampar Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang  
berjudul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO.7 TAHUN 2018  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

JL.RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG  
 TANJUNG

Kode Pos : 28453

**REKOMENDASI**

Nomor :070/UM-KTKH/2020/119

**Tentang**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/770, tanggal 21 Desember 2020, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1  | Nama                    | : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI   |
| 2  | NIM                     | : 11724101212   |
| 3  | Fakultas                | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4  | Jurusan / Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 5  | Jenjang                 | : S1  |
| 6  | Alamat                  | : PEKANBARU   |
| 8  | Judul Penelitian        | : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7<br>TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN<br>PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA<br>PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM PERSPEKTIF<br>FIQIH SIYASAH |
| 9  | Lokasi                  | : KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR   |
| 10 | Keterangan              | : Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan<br>ketentuan dan undang-undang yang berlaku,  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung  
 Pada tanggal : 30 Desember 2020

**CAMAT KOTO KAMPAR HULU**



**AHMAD BEGAB, S.Sos, M.SI**  
 NIP. 197806042006041014

**Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

JL.RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG  
 TANJUNG

Kode Pos : 28453

**REKOMENDASI**

Nomor :070/UM-KTKH/2020/119

**Tentang**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/770, tanggal 21 Desember 2020, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1 Nama                    | : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI  |
| 2 NIM                     | : 11724101212  |
| 3 Fakultas                | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4 Jurusan / Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 5 Jenjang                 | : S1   |
| 6 Alamat                  | : PEKANBARU  |
| 8 Judul Penelitian        | : <b>IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7<br/>TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN<br/>PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA<br/>PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM PERSPEKTIF<br/>FIQIH SIYASAH</b> |
| 9 Lokasi                  | : KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR  |
| 10 Keterangan             | : Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung  
 Pada tanggal : 30 Desember 2020

**CAMAT KOTO KAMPAR HULU**



**AHMAD BEGAB, S.Sos, M.SI**  
 NIP. 197806042006041014

**Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :**

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/770

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37205 tanggal 14 Desember 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI  |
| 2. NIM              | : 11724101212  |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 5. Jenjang          | : S1   |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : <b>IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH</b> |
| 8. Lokasi           | : KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 21 Desember 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Sdr. Camat Koto Kampar Hulu di Tempat

sim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37205  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6986/2020 Tanggal 7 Desember 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

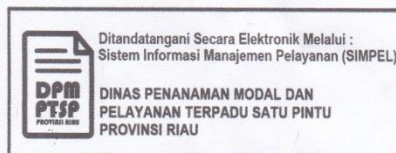
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD KHAIRUL ASRI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11724101212  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO.7 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGULANGGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENNULIS



**MUHAMMAD KHAIRUL ASRI**, Lahir di Sibiruang pada tanggal 17 November 1998. Anak kedua dari Tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda, Drs H. Syafril Imam dan Hj. Mardiana S.Pdi. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 008 Desa Bandur Picak, Kampar, Riau, lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Nurul Falah Sibiruang, Kampar, lulus tahun 2014 , Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 MODEL Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KAMPAR NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMTAN KOTO KAMPAR HULU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 25 Maret 2021 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.62 (Cumlaude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).